

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan yang dilakukan, penelitian mengenai merdeka belajar sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, untuk lebih mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah di atas, penulis berusaha melakukan peninjauan terhadap beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian. Adapun beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti yang menjadi kajian penulis pada penelitian diantaranya adalah sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Sumarsih, dkk (Sumarsih et al., 2022) pada tahun 2022 dengan judul Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar. Penelitian ini untuk mengetahui dan menelaah tentang "Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak SDN Guruminda 244 Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalaman-pengalamannya. Dari hasil penelaahan dalam penelitian ini ditemukan adanya kurikulum merdeka yang menjadi acuan di sekolah penggerak, yang menghasilkan siswa yang berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, rasa kebhinekaan. Kepala sekolah penggerak mendorong berbagai macam program partisipatif, unik, dan banyak inovasi. Memupuk kerja sama dengan guru-guru yang mendukung pemimpinya berpartisipasi dalam mewujudkan sekolah penggerak.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Armania & Jarnawi pada tahun 2022 (Armania et al., 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi standar proses kurikulum sekolah penggerak dalam pembelajaran matematika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Dalam penelitian ini dilakukan analisis aspek-aspek pada komponen modul ajar yang telah guru rancang sebelumnya berpedoman pada dokumen-dokuman asli pemerintah yang didapat oleh guru pada saat pelaksanaan pelatihan sekolah penggerak. Berdasarkan hasil analisis pada modul ajar, modul ajar yang dirancang oleh guru sesuai dengan pedoman yang telah diberikan pemerintah, tetapi terdapat aspek-aspek pada komponen modul ajar yang belum lengkap yakni dalam merumuskan tujuan pembelajaran,

pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, pertanyaan pemantik, pemahaman bermakna, materi yang akan disampaikan serta alokasi waktu.

Penelitian tentang Implementasi Program Sekolah Penggerak (PSP) Tahun 2021 di SDN 23 Menyumbang Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang diteliti oleh Jumadi Budiman, dkk (Budiman et al., 2022) Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi Program Sekolah Penggerak (PSP) tahun 2021 di SDN 23 Menyumbang, Kabupaten Sintang. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan bentuk penelitian etnografi sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kompetensi kepemimpinan kepala sekolah mengalami peningkatan dalam hal merancang arah kebijakan, mengelola SDM, merancang anggaran sekolah dan membangun kemitraan dengan para pemangku kepentingan setelah intervensi PSP; 2) Terjadi adaptasi perubahan kinerja guru dalam proses pembelajaran yakni guru membimbing siswa secara lebih intensif di kelas serta menggunakan media sehingga siswa lebih mudah memahami materi; 3) Beberapa faktor internal yang mendukung perubahan awal implementasi PSP di SDN 23 Menyumbang yakni: sikap, komitmen dan kompetensi manajerial kepala sekolah, kinerja dan respon positif guru terhadap perubahan kebijakan pendidikan, dukungan orang tua melalui komite sekolah, serta kondisi sekolah yang dapat berhubungan dengan listrik dan jaringan internet. Sedangkan faktor eksternal yakni kondisi socio-economic-cultural masyarakat, dukungan bantuan dari industri dan pemerintah lokal dan dukungan kebijakan pemerintah daerah.

Penelitian selanjutnya yaitu Implementasi Kebijakan Program Merdeka Belajar (Studi pada guru penggerak di SDN Pisang Candi 4 Kota Malang) yang dilakukan oleh Aisam dkk, pada tahun 2022 (Khannanah & Juniati, 2022). Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada pengungkapan makna dan proses yang berhubungan dengan perilaku dan tindakan. Hasil penelitian di SDN Pisangcandi 4 Kota Malang terhadap implementasi program guru penggerak menghasilkan dampak positif bagi peningkatan mutu kreativitas pelajar di SDN Pisangcandi 4. Dengan adanya program guru penggerak, selain mendorong siswa menjadi lebih mandiri, kreatif dan inovatif dalam proses belajar di dalam kelas, salah satu program guru penggerak di SDN Pisangcandi 4 yaitu memanfaatkan media belajar dari lingkungan sekitar dan merubahnya menjadi barang yang memiliki nilai guna. Dengan kerjasama yang baik antara warga sekolah dengan wali murid terbentuklah program merubah minyak jelantah yang dikumpulkan dari wali murid menjadi suatu barang nilai guna berupa lilin aromateraphy.

Menurut Meylan Saleh dalam jurnalnya yang berjudul Merdeka Belajar di Tengah Pandemi Covid, penelitian ini menekankan bahwa Program "Merdeka Belajar" yang merupakan gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ini merupakan pilihan bebas yang dapat diberikan kepada murid agar sesuai dengan minat dan karakter mereka. Sebagian pengajar menerapkan metode pengajaran konservatif, peneliti juga menuliskan bahwa sekalipun kita berada pada kondisi pandemic Covid-19 diharapkan kepada seluruh pelaksana pendidikan dapat menerapkan konsep merdeka belajar sehingga dapat menjadikan pendidik dan siswa mengeksplorasi kreatifitas, berinovasi sementara guru penggerak menjadi subyek yang terus menerus mencari solusi atas tantangan.

Dari berbagai penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. terdapat indikator yang menunjukkan persamaan antara penelitian yang telah dilakukan dan penulisan dilakukan adalah sejauhmana efektifitas kebijakan dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan. Sedangkan perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis antara lain; Pertama, pada penelitian ini lebih menitikberatkan pada partisipasi stakeholder baik pemerintah daerah, kementerian, sekolah dan lain sebagainya dalam komponen pendidikan yang tertera dalam kebijakan program sekolah penggerak, Kedua optimalisasi kebijakan dalam bentuk penguatan SDM disekolah, ditengah perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, Ketiga, elemen pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tentang Program Sekolah Penggerak untuk peningkatan mutu pendidikan.

## **B. Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan (*policy*) merupakan sebuah alat dalam pemerintahan baik secara entitas administratif dan dalam tataran pengelolaan sumber daya public secara umum. Kebijakan publik diartikan sebagai rangkaian langkah yang dilakukan secara sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah dengan adanya keterlibatan berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Ramdhani & Ramdhani, 2016). Dalam mencapai pelaksanaan kebijakan public yang efektif dan efisien, maka pelaksanaan kebijakan public perlu melalui upaya sosialisasi, pelaksanaan, dan pengawasan dalam kebijakan yang dijalankan.

Thomas R. Dye dalam Riant Nugroho (2008:54) menjelaskan bahwa kebijakan public merujuk pada segala yang dipilih atau tidak dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan. Sehingga

Dye, menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah perlu ditelisik kebijakannya dan manfaat apa yang mampu mempengaruhi kegiatan hidup bersosial secara bersama. Kebijakan public dijelaskan sebagai sebuah langkah yang diambil dalam mencapai tujuan bukan langkah yang dijalankan dengan keadaan yang terjadi secara spontan. Kebijakan public diartikan sebagai kegiatan yang disadari untuk mencapai suatu tujuan dengan arahan yang diberikan oleh pemerintah secara terpusat dengan adanya pola keterkaitan antara tindakan yang dilakukan dalam mencapai tujuan.

Pemerintah perlu memberikan panduan dan pembinaan dalam mengatasi sebuah permasalahan atau menuju pada keputusan yang tidak mengambil tindakan tertentu (Desrinelti et al., 2021). Kebijakan publik adalah fakta strategis yang melibatkan preferensi politis dari para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan. Ini terutama berlaku dalam proses perumusan kebijakan (Alfarizi, 2018). Dalam konteks strategis, kebijakan publik tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga dampak negatif, dimana keputusan yang diambil memilih satu hal sementara menolak hal lain.

Sebagai strategi, kebijakan publik tidak hanya berdampak positif, tetapi juga berdampak negatif, artinya dalam pengambilan keputusan, ada pilihan yang diterima dan ada pilihan yang ditolak. Meskipun ada kemungkinan untuk mencari solusi saling menguntungkan dan mengakomodasi berbagai tuntutan, tetapi pada akhirnya ruang untuk solusi tersebut terbatas, sehingga lebih banyak kebijakan publik mengambil konsep win-sum-game, yaitu memilih suatu hal dan menolak hal lain.

### 1. Arti Penting Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu upaya untuk mengatur kehidupan untuk mencapai tujuan bersama yang disepakati. Hal ini sesuai dengan paparan Riant Nugroho (2006: 52) bahwa setiap hal yang ada di dunia pasti ada tujuannya.

Gambar 2.1 Ideal Kebijakan Publik



Sumber : Riant Nugroho (2006: 52)

Berdasarkan gambar diatas dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan bersama yang dicitakan maka kebijakan publik menjadi sebuah jembatan untuk mencapainya. Indonesia bercita-cita untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan) dan UUD 1945 (Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan), maka kebijakan publik menjadi media untuk mencapai hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan public berkedudukan sebagai manajemen pencapaian tujuan nasional, yang dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kebijakan publik mudah untuk dipahami karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.
- b. Kebijakan publik mudah diukur karena ukurannya jelas, yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

## 2. Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik

Riant Nugroho (2008: 61) mengatakan bahwa teori tentang kebijakan memang sangat banyak, namun secara sederhana bentuk kebijakan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar yaitu dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi secara formal dan legal. Setiap peraturan dari tingkat "Pusat" atau "Nasional" hingga tingkat desa atau kelurahan merupakan salah satu bentuk kebijakan publik. Undang Undang No. 10/2004 tentang Peraturan Perundang-undangan Pasal 17 mengatur jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah

Kebijakan publik yang berifat meso atau menengah, atau penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Wali Kota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar-menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota.

Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota.

Ada beberapa pengecualian, kebijakan publik yang bersifat makro dan meso kadang bersifat implementasi langsung namun tidak berarti itu suatu kekeliruan. Kebijakan seperti ini dapat dikatakan lebih efisien karena tidak memerlukan peraturan penjabar tambahan yang akan menjadikan kebijakan tersebut secara formulasi saja sudah *high cost economy*, dan dalam pelaksanaannya akan semakin high cost secara ekonomi. Tidak ada preferensi yang terbaik akan bentuk kebijakan. Namun demikian, trend ke depannya bentuk kebijakan adalah kebijakan-kebijakan yang detail sampai implementasi sehingga tidak perlu menambahkan kebijakan baru di bawahnya. Hanya ada kelemahan utama, yaitu jika diperlukan adanya perubahan karena prosesnya sangat sulit, berat, dan mahal, karena yang diubah adalah induk kebijakan. Berbeda jika yang hendak diubah adalah kebijakan di bawahnya, yaitu tingkat penjabar atau pelaksanaan.

Kebijakan publik juga memiliki bentuk lain, yaitu pernyataan lisan para pejabat publik. Pernyataan pejabat publik ini harus dan selalu mewakili lembaga publik yang diwakilinya atau dipimpinya. Namun tidak semua pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat publik tersebut merupakan kebijakan publik, pernyataan yang paling dapat dianggap sebagai kebijakan publik adalah pernyataan yang disampaikan dalam forum resmi dan dikutip oleh media massa dan disebarluaskan kepada masyarakat luas. Dengan demikian setiap pejabat publik harus bijaksana dalam mengemukakan pernyataan-pernyataan yang berkenaan dengan tugas dan kewenangan dari lembaga publik yang diwakilinya.

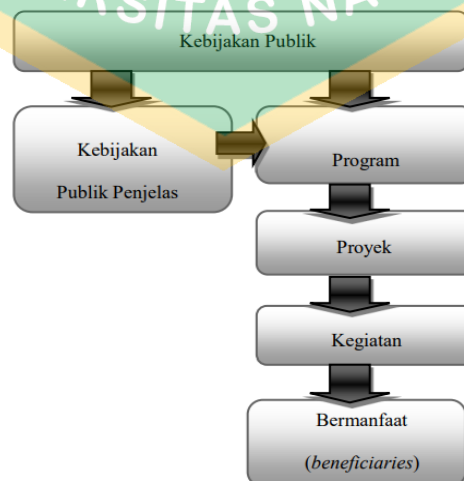
### **C. Konsep Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan pada dasarnya dapat diartikan sebagai proses menjalankan suatu kebijakan yang telah dirancang atau dibuat sebelumnya. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn, yang menggambarkan implementasi kebijakan sebagai langkah-langkah yang diambil oleh individu atau kelompok dari sektor pemerintah atau swasta dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya (Winarno, 2002). Tindakan-tindakan yang dimaksudkan oleh Van Meter dan Van Horn mencakup berbagai upaya untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu dan melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan baik besar maupun kecil yang telah ditentukan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan kata lain, fokus implementasi kebijakan terletak pada tahap setelah undang-undang dan anggaran telah ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan.

Wibawa (dalam Yuliah, 2020) juga memberikan definisi lain tentang implementasi kebijakan publik, menggambarkan sebagai bentuk konkretisasi keputusan yang berkaitan dengan kebijakan mendasar, seperti undang-undang dan instruksi. Sementara itu, Grindle menekankan bahwa berhasilnya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Kedua faktor ini berkaitan dengan sejauhmana dukungan kelompok kepentingan, tujuan perubahan yang diharapkan, apakah kebijakan sudah sesuai, serta dukungan sumber daya yang memadai.

Selanjutnya, Wahab menyatakan bahwa implementasi kebijakan melibatkan tindakan-tindakan yang diambil oleh individu atau kelompok baik dari sektor publik maupun swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya (Yuliah, 2020: 134). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap konkretisasi suatu kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemangku kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan dereviat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut.

**Gambar 2.2 Sekuensi Implementasi Kebijakan**



Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60%, dan 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu ancaman utama adalah konsistensi implementasi.

### **1. Model Implementasi Kebijakan Grindle**

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam rangkaian kebijakan publik. Salah satu pendekatan implementasi kebijakan yang dapat diterapkan dalam administrasi pemerintahan adalah model yang diajukan oleh Merille S. Grindle. Grindle, sebagaimana dikemukakan oleh Wahab (2012), mengungkapkan bahwa implementasi merupakan aspek yang signifikan dalam keseluruhan proses kebijakan. Di samping itu, menurut pandangan Nugroho (2014), gagasan pokok implementasi kebijakan menurut Grindle adalah setelah kebijakan melalui tahap transformasi, langkah implementasi akan diambil. Lebih lanjut, Grindle, seperti yang dinyatakan dalam kajian Winarno, mengemukakan bahwa esensi implementasi adalah menciptakan hubungan yang memudahkan pencapaian tujuan kebijakan sebagai hasil dari upaya pemerintah (Masriani, 2017).

Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan langkah pelaksanaan yang mengikuti proses perumusan kebijakan. Tujuan dari implementasi kebijakan adalah mencapai sasaran dari program yang telah dirancang dan didanai sebelumnya. Implementasi memiliki cakupan yang komprehensif karena melibatkan berbagai aspek kebijakan, termasuk pelaksana, penerima, potensi konflik di antara para pelaku implementasi, dan sumber daya yang diperlukan (Wanto, 2017).

Model implementasi Grindle juga bersifat holistik, tidak hanya memfokuskan pada dimensi birokrasi sebagai pelaku, tetapi juga mempertimbangkan kelompok target (Alfa, 2016). Selain itu, menurut Grindle dalam teori implementasi kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tercermin dalam pencapaian hasil akhir, baik itu pencapaian tujuan atau ketidaktercapaiannya (Agustino, 2008). Dalam hal ini, evaluasi dapat dilakukan berdasarkan konsistensi implementasi dengan desain kebijakan serta dampak yang dihasilkan pada masyarakat dan kelompok sasaran.

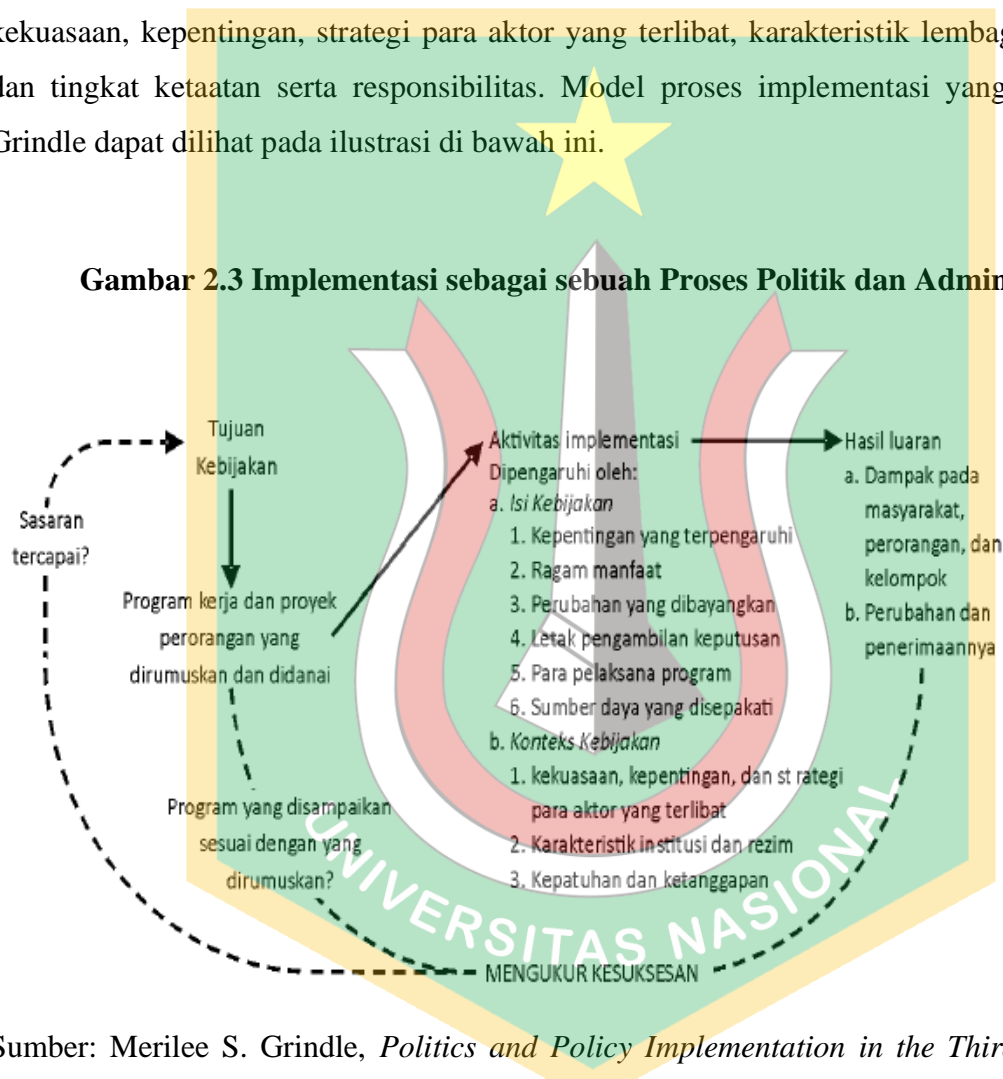
Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan, penting untuk merujuk pada pedoman dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Hasilnya dapat dinilai berdasarkan dampaknya pada masyarakat dan perubahan yang terjadi, terutama setelah penerapan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan



dipengaruhi oleh kepentingan dan strategi para aktor yang terlibat, karakteristik lembaga pemerintah, serta tingkat ketaatan dan responsibilitas.

Grindle mengemukakan bahwa untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan, perlu ada sinergi antara tiga faktor penting: isi kebijakan, organisasi, dan konteks kebijakan. Sinergi ini memastikan bahwa melalui kebijakan yang sesuai, implementasi dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selain itu, implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh isi kebijakan dan lingkungan implementasi, yang mencakup faktor seperti kekuasaan, kepentingan, strategi para aktor yang terlibat, karakteristik lembaga pemerintah, dan tingkat ketaatan serta responsibilitas. Model proses implementasi yang disusun oleh Grindle dapat dilihat pada ilustrasi di bawah ini.

**Gambar 2.3 Implementasi sebagai sebuah Proses Politik dan Administratif**



Sumber: Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princetown University Press, 1980, hlm.11.

Berdasarkan kerangka implementasi kebijakan di atas, kebijakan publik diubah menjadi program aksi dengan tujuan untuk mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan. Grindle lebih lanjut menjelaskan "... bahwa berbagai program dapat dikembangkan sebagai tanggapan terhadap tujuan kebijakan yang sama." Ini berarti bahwa berbagai program bisa dibentuk dan dikembangkan sebagai respons untuk mencapai tujuan kebijakan yang serupa. Program-

program ini dapat dibagi menjadi proyek-proyek yang lebih spesifik dan kemudian diimplementasikan (Nurdin, 2019). Perlu ditekankan bahwa tujuan dari pembentukan program aksi dan proyek-proyek ini adalah untuk menyebabkan perubahan dalam lingkungan di mana kebijakan akan dijalankan. Perubahan ini dianggap sebagai hasil dari pelaksanaan program (Grindle, 1980:6).

Dalam tahap implementasi, Grindle memandang pelaksanaan sebagai proses umum dari tindakan administratif. Ini berarti bahwa keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan bisa dievaluasi berdasarkan kemampuan pelaksana untuk menjalankan program tersebut. Dalam proses implementasi, Grindle (1980:8) berpendapat bahwa "... proses implementasi sangat dipengaruhi oleh jenis tujuan yang telah ditentukan untuknya dan oleh cara di mana tujuan tersebut telah dinyatakan." Ini berarti bahwa proses implementasi sangat dipengaruhi oleh jenis-jenis tujuan yang ditetapkan untuknya dan cara di mana tujuan tersebut dijelaskan (Nurdin, 2019). Dengan demikian, setiap keputusan mengenai jenis kebijakan yang akan dicapai dan bentuk program yang akan dilaksanakan dianggap sebagai faktor penting dalam menentukan kesuksesan pelaksanaan program tersebut. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ditentukan dan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu isi kebijakan (*the content of policy*) dan konteks kebijakan (*the context of policy*).

#### **a. Materi Muatan Kebijakan (*the Content of Policy*)**

Menurut pandangan Grindle (dalam Nurdin, 2019), analisis mengenai dampak nyata yang terjadi dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang serupa dengan proses implementasi. Hal ini melibatkan pertimbangan terhadap kelayakan pelaksanaan dari setiap program yang akan dijalankan. Dari pernyataan ini dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan adalah sejauh mana program-program yang dirancang dapat dijalankan secara efektif. Grindle (1980:7) sebelumnya telah menyatakan bahwa "Keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dapat dinilai berdasarkan kapasitas untuk mengirimkan program-program sebagaimana yang telah direncanakan" (keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan bisa dievaluasi dengan melihat kemampuan untuk menjalankan program-program sesuai dengan yang telah direncanakan). Variabel dalam isi kebijakan mencakup beberapa subvariabel yang secara langsung mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Beberapa subvariabel yang mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan kebijakan adalah: kepentingan yang terdampak (*Interest affected*); jenis-jenis manfaat (*type of benefits*); tingkat perubahan yang direncanakan (*extent of change envisioned*); lokasi pengambilan keputusan (*site of decision making*); pelaksana program

(*program implementors*); dan sumber daya yang terlibat (*resources committed*). Berikut uraian lengkap mengenai subvariabel-subvariabel materi muatan kebijakan.

### **1) Kepentingan yang terpengaruhi (*Interest affected*)**

Suatu kebijakan dalam pelaksanaan pasti melibatkan beberapa pemangku kepentingan yang mana pemangku kepentingan inilah yang akan memberikan pengaruh cukup besar terhadap jalannya kebijakan tersebut. Proses implementasi kebijakan akan terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan baik individu maupun kelompok (Nurdin, 2019). Kepentingan dalam suatu kebijakan ini muncul dari mulai proses pendanaan, hingga pelaksanaan dari kebijakan itu sangat dipengaruhi oleh kepentingan – kepentingan yang ada.

### **2) Ragam manfaat (*type of benefits*)**

Selain masalah kepentingan, isi kebijakan yang menawarkan keuntungan atau manfaat bersama (*collective benefits*) juga menjadi bahan pertimbangan. Program yang memberikan ragam manfaat terhadap masyarakat luas cenderung akan terhindar dari konflik atau perselisihan di kemudian hari dibandingkan dengan program yang tidak bermanfaat, yang tentunya akan memperburuk keadaan masyarakat sekitar yang terkena dampaknya. Tentu, dalam keadaan yang demikian eksekusi program akan menjadi sulit (Nurdin, 2019).

Pada implementasi kebijakan berupaya ingin menimbulkan suatu manfaat baik itu dampak positif maupun negatif yang nantinya akan diberikan pada hasil akhir jalannya kebijakan tersebut. Dengan kata lain, manfaat kebijakan berupaya untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa di dalam sebuah kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang membuat dan menghasilkan dampak positif dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Manfaat kebijakan ini dapat menjadi pendorong pelaksanaan kebijakan dan menjadi titik tujuan sebuah kebijakan dilaksanakan.

### **3) Sejauhmana perubahan yang dibayangkan (*extended of change envisioned*)**

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Pada point ini menjelaskan bahwa pada implementasi kebijakan harus memiliki suatu ukuran perubahan yang jelas yang akan dicapai oleh pembuat kebijakan. Kebijakan yang diimplementasikan berguna untuk menghasilkan sebuah perubahan, sehingga dalam suatu kebijakan tersebut harus memiliki target seberapa besar perubahan yang dikehendaki dengan adanya kebijakan tersebut. Karena bahwasanya pembuatan kebijakan tersebut ditujukan memang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mana nantinya akan berwujud perubahan.

### **4) Tempat pembuatan keputusan (*site of decision making*)**

Tempat implementasi (*the site of implementation*) juga memegang peranan penting dalam menentukan isi kebijakan. Dimana letak pengambilan keputusan suatu kebijakan akan

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Berkaitan dengan letak pengambilan keputusan, Grindle (1980:10) menekankan *“As the site of implementation becomes more dispersed, both geographically and organizationally, the task of executing a particular program becomes more difficult, given the increase in decisional units involved”*. Penekanan tersebut bermakna bahwa implementasi suatu program akan menjadi lebih sulit jika letak implementasi program atau kebijakan itu berada jauh dan tersebar, baik secara geografis maupun secara organisasi. Pada fase ini yang menjadi point sangat penting karena setiap pengambilan keputusan diharapkan akan mampu menciptakan suatu kebijakan yang memiliki manfaat serta arah perubahan yang jelas dari pelaksanaan kebijakan tersebut (Subarsono, 2010)

##### **5) Para pelaksana program (*program implementors*)**

Dalam mengimplemetasikan suatu kebijakan harus memiliki suatu pelaksana yang kompeten dan kapabel yang mana nantinya ini akan mempengaruhi suatu keberhasilan dari implementasi kebijakan itu sendiri (Subarsono, 2010). Pelaksana program merupakan bagian penting dalam implementasi kebijakan, karena menjalankan kebijakan agar tujuan kebijakan tersebut terjadi. Bukan hanya pembuat kebijakan yang menjalankan kebijakan tersebut tetapi bisa didukung semisalnya oleh masyarakat, swasta, LSM-LSM dan lainnya. Grindle (1980:10) menyatakan bahwa *“Decisions made during policy formulation may also indicate who is to be charged with executing various programs, and such decisions can affect how the policy is pursued.”* Keputusan yang menentukan siapa yang berwenang dan bertanggungjawab untuk melaksanakan berbagai program yang telah dirumuskan selama tahap formulasi kebijakan, akan mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan.

##### **6) Sumber daya yang disepakati (*resources committed*)**

Pada point ini sama dengan point sebelumnya yang mana pada pelaksanaannya harus didukung oleh sumber – sumber daya yang mendukung agar implementasinya berjalan baik. Sumber daya disini yang dimaksud tidak hanya mencakup sumber daya manusia, namun juga sumber daya - sumber daya lainnya. Dukungan sumber daya yang memadai bertujuan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik, sehingga mencapai tujuan dari kebijakan tersebut (Subarsono, 2010). Selain itu, aspek sumber daya juga mengacu pada beberapa jenis sumber daya lainnya seperti sumber daya anggaran dan fasilitas yang dapat mendukung suatu pelaksanaan kebijakan.

#### **b. Konteks Kebijakan (*the Context of Policy*)**

Meskipun isi kebijakan dianggap sebagai variabel penting yang mempengaruhi hasil luaran dari suatu implementasi kebijakan, perlu dicatat bahwa mempertimbangkan konteks suatu kebijakan juga dianggap sebagai hal yang sama pentingnya. Menurut Grindle Variabel (1980:10), konteks kebijakan mencakup beberapa subvariabel yang secara langsung mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Subvariabel yang mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan antara lain: kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat (*power, interests, and strategies of actors involved*); karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*institution and regime characteristics*); dan tingkat kepatuhan dan daya tanggap (*compliance and responsiveness*).

### **1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat (*power, interests, and strategies of actors involved*)**

Pertimbangan awal yang harus dipertimbangkan adalah mengenai pelaksana yang terlibat. Dalam tahap pelaksanaan, terdapat berbagai pihak yang berupaya untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan. Tidak dapat disangkal bahwa kekuasaan implementor, baik yang berada di tingkat atas atau bawah, skala nasional, regional, maupun lokal, memainkan peran penting. Setiap pelaksana memiliki kepentingan individu terhadap program yang sedang dijalankan. Mungkin terdapat situasi di mana tujuan pribadi para aktor tersebut dapat menghasilkan konflik. Grindle (1980:12) menekankan bahwa "Tujuan para aktor akan saling bertentangan satu sama lain dan hasil konflik ini, serta siapa yang mendapatkan apa, akan ditentukan oleh strategi, sumber daya, dan posisi kekuasaan masing-masing aktor yang terlibat." Pada tahap ini, hasil yang muncul dari konflik kepentingan para pihak akan dipengaruhi oleh strategi, sumber daya, dan sejauhmana kekuasaan dari masing-masing aktor yang terlibat. Analisis implementasi program mungkin akan menilai kemampuan kekuasaan (*power capabilities*) para aktor, kepentingan mereka, termasuk strategi yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan mereka, dan pengaruh dari rezim yang berkuasa (Grindle, 1980:12). Oleh karena itu, dalam aspek lingkungan kebijakan, segala hal yang berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang memengaruhi proses implementasi tidak dapat diabaikan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

### **2) Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*institution and regime characteristics*)**

Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan serta rezim yang berkuasa akan berpengaruh pada implementasi kebijakan, karena tidak semua kebijakan bisa berjalan dengan lancar jika kedua

variable ini tidak terlalu diperhatikan. Karakteristik lembaga juga merujuk pada lingkungan di mana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga memiliki pengaruh terhadap keberhasilannya atau institusi/lembaga dimana pelaksanaan kebijakan tersebut diselenggarakan.

### 3) Tingkat kepatuhan dan daya tanggap (*compliance and responsiveness*)

Menurut pandangan Grindle, dalam upaya mencapai tujuan suatu kebijakan, pejabat publik menghadapi dua isu yang berkaitan dengan interaksi mereka dengan lingkungan dan proses administratif, yakni: tingkat kepatuhan (*compliance*) dan tingkat ketanggapan (*responsiveness*). Mengenai isu pertama, para pelaku harus mengatasi tantangan terkait dengan bagaimana memastikan tercapainya kepatuhan (*compliance*). Seperti yang Grindle (1980:12) katakan, "...para pejabat harus mengatasi masalah tentang bagaimana mencapai kepatuhan terhadap tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan." Grindle memberikan beberapa pendekatan kepada para pelaku untuk menangani isu ini. Salah satunya adalah dengan memperoleh dukungan dari elit politik, lembaga pelaksana, birokrat yang terkait dengan program yang akan dijalankan, dan juga dukungan masyarakat yang akan merasakan dampaknya (Grindle, 1980:12).

Selain masalah kepatuhan (*compliance*), sisi lain dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kebijakan adalah responsif (*responsiveness*). Idealnya, semua tingkat birokrasi dalam institusi negara harus responsif dalam melaksanakan tugasnya, untuk memberikan pelayanan publik yang optimal dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Tanpa responsif, sulit untuk mengatakan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil dan tujuan-tujuannya akan tercapai. Artinya, tanpa responsif, para pejabat publik akan kehilangan kesempatan untuk mencapai kesuksesan dalam melaksanakan program yang direncanakan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pencapaian tujuan.

Grindle (1980:13) menjelaskan bahwa "Masalah bagi administrator publik adalah memastikan tingkat responsif yang memadai untuk memberikan fleksibilitas, dukungan, dan umpan balik, sambil pada saat yang sama menjaga kendali atas distribusi sumber daya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan." Dari pernyataan ini, tampaknya ada tantangan yang harus diatasi oleh para pejabat publik, yaitu bagaimana memberikan tingkat responsif yang memadai untuk memberikan fleksibilitas, dukungan, dan umpan balik, sambil tetap menjaga kontrol terhadap alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Teori implementasi Grindle ternyata sudah berkembang dengan pengembangan konsep konten kebijakan serta konteks kebijakan. Penelitian ini mengklasifikasikan beberapa penelitian yang sudah mengadopsi teori Grindle dalam implementasi kebijakan, sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu**

NO	Judul/Tahun/Penulis	Indikator	Sub Indikator
1	<p><b>Judul:</b> Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber</p> <p><b>Tahun:</b> 2023</p> <p><b>Penulis:</b> Yudistira Adnyana, Sri Sulandari, IW. Astawa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isi Kebijakan</li> <li>• Konteks Kebijakan</li> <li>• Proses Kebijakan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan masalah</li> <li>2. Kemampuan undang-undang mengatur implementasi</li> <li>3. Kendala</li> <li>4. Struktur Birokrasi</li> </ol>
2	<p><b>Judul:</b> Implementasi Kebijakan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan</p> <p><b>Tahun:</b> 2023</p> <p><b>Penulis:</b> Andi Syarif Hidayatullah Aksa, I Nyoman Sumaryadi, Hyronimus Rowa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan yang ada</li> <li>• Kelompok organisasi</li> <li>• Lingkungan kebijakan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partisipasi masyarakat</li> <li>2. Sarana dan prasarana melalui pendidikan, ekonomi, Kesehatan desa</li> <li>3. Peningkatan aksesibilitas warga dengan infrastruktur desa</li> <li>4. Dominasi Pemerintah Desa</li> </ol>
3	<p><b>Judul:</b> Socio-Political and Economic Studies in Conflict Implementation of Building Approval Permits in Gianyar Regency, Bali, Indonesia</p> <p><b>Tahun:</b> 2022</p> <p><b>Penulis:</b> I Made Dwipa Arta, Nyoman Budiarta, Ngakan Ketut Acwi Dwijendra, Anak Agung Gde Agung Yana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konten Kebijakan</li> <li>• Konteks kebijakan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan tertulis</li> <li>2. Batasan dalam aktivitas pengembangan</li> <li>3. Penangguhan sementara atau permanen</li> <li>4. Pembekuan atau pembatalan persetujuan</li> <li>5. Penghancuran kesepakatan</li> <li>6. Faktor pendukung dan faktor penghambat</li> </ol>
4	<p><b>Judul:</b> Implementation of the Regional Regulation of the Bangka Belitung Islands Province Number 8 of 2018 Concerning Control of Pollution and Environmental Damage (Case Study of Environmental Pollution and Damage in Central Bangka Regency)</p> <p><b>Tahun:</b> 2022</p> <p><b>Penulis:</b> Ismodi, Ibrahim, Komang Jaka Ferdian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konten Kebijakan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batasan daerah yang bersifat final</li> <li>2. Jangka waktu mediasi selama enam bulan bagi perselisihan antar desa</li> <li>3. Kejelasan kepemilikan wilayah bagi masyarakat</li> <li>4. Kepala Desa sebagai pengambil keputusan</li> </ol>
5	<p><b>Judul:</b> Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses Kebijakan</li> <li>• Objek Tujuan Kebijakan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konten Kebijakan</li> <li>2. Konteks Kebijakan</li> <li>3. Dampak pada individu,</li> </ol>

	S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework <b>Tahun:</b> 2020 <b>Penulis:</b> Syahrul Mubarak, Soesilo Zauhar, Endah Setyowati, Suryadi		masyarakat, dan grup 4. Level perubahan dan penerimaan
--	--	--	---

(Sumber: Penulis, 2023)

Hasil pemetaan diatas mengungkapkan bahwa indikator implementasi kebijakan sesuai dengan teori Grindle memiliki dua indikator yaitu konteks kebijakan dan konten kebijakan. Berdasarkan pada hasil pemetaan, diketahui bahwa kedua unsur tersebut menjadi rujukan untuk berinovasi. Dalam mengukur konten kebijakan serta konteks kebijakan, diketahui bahwa konten kebijakan mengarah pada objek tujuan kebijakan yang didominasi oleh pemerintah itu sendiri. Adapun dominasi ini dipenuhi dengan kebermanfaatn pada target sasaran baik secara jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Konten kebijakan tidak hanya dilihat dari tujuan serta pengaruh yang ada, namun dilihat juga dari bagaimana kemampuan regulasi baik secara tertulis atau tidak tertulis mampu mempengaruhi target sasaran untuk mengikuti atau patuh terhadap regulasi yang ada. Indikator keberhasilan konten kebijakan sebenarnya dapat diukur dengan pengaruh dari regulasi yang ada terhadap relativitas serta aksesibilitas masyarakat dengan partisipasi aktif bagi keberlangsungan program itu sendiri. Konten kebijakan ini sendiri dapat menjadi sumber informasi terpusat yang mampu berpengaruh pada keberlangsungan konteks kebijakan. Sehingga konteks kebijakan yang diukur dengan proses penerapan kebijakan mulai dari struktur birokrasi, kendala dan dukungan yang dialami, peningkatan manfaat yang dialami, konsekuensi waktu yang dijalani. Hal ini mampu menunjukkan keberlangsungan penerapan indikator implementasi kebijakan yang baik dapat terukur melalui sikap dengan adanya perubahan partisipasi di masyarakat serta proses yang ditransformasikan dalam kerangka kerja yang kongkret.

Berdasarkan sintesis dari pengembangan indikator model Teori Grindle, penerapan Teori Grindle yang sesuai dalam penelitian disintesis sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Hasil Sintesis Teori Grindle**

Indikator	Subindikator	Penjelasan/Urgensi
<b>Konteks kebijakan</b>	<b>Struktur birokrasi</b>	Proses implementasi dipengaruhi oleh implementasi kebijakan dengan unsur pembuat kebijakan yang relative tinggi, sehingga diketahui bahwa Teori Grindle mampu menjelaskan implementasi bagi pemerintahan daerah yang berfokus pada birokrasi sebagai pelaksana program dan kegiatan.
	<b>Dominasi pemerintah</b>	Pemerintah merupakan aktor penting dalam implementasi kebijakan terutama pada proses politik



		dalam Teori Grindle. Dominasi pemerintah memberikan pengaruh pada implementasi kebijakan terutama dalam mengembangkan wilayah setempat
	<b>Partisipasi target</b>	Keberhasilan implementasi program dapat diukur dengan keberlanjutan program yang diikuti oleh target sasaran. Dalam hal ini dapat dilihat bagaimana partisipasi target dalam mengelola kembali implementasi kebijakan dan sejauh mana dampaknya mampu memberikan manfaat
<b>Isi Kebijakan</b>	<b>Peningkatan aksesibilitas sasaran</b>	Peningkatan aksesibilitas sasaran merupakan tolak ukur yang dikembangkan dalam Teori Grindle terkait percepatan kesejahteraan target sasaran dengan <u>pengembangan sarana dan prasarana.</u>
	<b>Perubahan dan penerimaan di masyarakat</b>	Perubahan dan penerimaan di masyarakat merupakan rujukan dari proses implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan objektif dari kebijakan sehingga kegiatan dan program yang dilakukan dirancang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada di Masyarakat
	<b>Dampak pada siswa keluarga dan masyarakat</b>	Aplikasi isi kebijakan merujuk pada tujuan kebijakan. Model implementasi Grindle ternyata mengukur kesuksesan program mulai dari dampak yang dirasakan secara individu, secara berkelompok, hingga di masyarakat. Sehingga pengukuran dapat terlihat dari dampak pada siswa, pada keluarga, dan masyarakat jika pengukuran dilakukan pada program kebijakan di sekolah.

(Sumber: Diolah Penulis, 2023)

Pengembangan dalam pengembangan indikator terkait model teori grindle tersebut ternyata memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam hal ini struktur birokrasi, dominasi pemerintah dan partisipasi target dianggap sebagai konteks kebijakan yang mampu mempengaruhi proses implementasi kebijakan dalam jangka pendek dan menengah hingga secara jangka Panjang. Keberhasilan implementasi kebijakan dengan model teori grindle dapat diukur dengan isi kebijakan yang dapat dilihat dari dampak yang terlihat baik bagi individu, kelompok kecil, hingga masyarakat. Hal ini dilakukan agar terlihat bagaimana implementasi kebijakan yang diterapkan mampu memberikan keberlanjutan dan peningkatan pada aksesibilitas sasaran yang diharapkan.

#### **D. Kebijakan Merdeka Belajar**

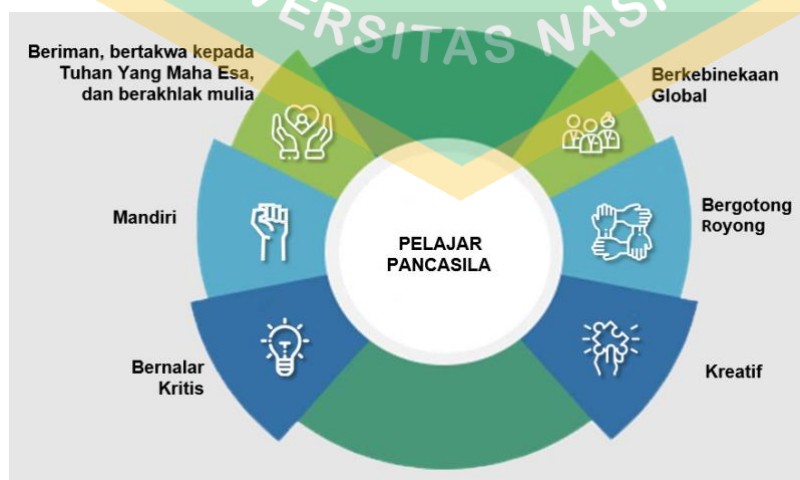
Kebijakan Merdeka Belajar yang diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dapat dianggap sebagai angin segar dalam konteks pendidikan, terutama karena sebelumnya sering menerima kritik bahwa pendidikan hanya bersifat formal belaka. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjadikan pendidikan sebagai suatu entitas yang merefleksikan esensi dari definisi pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2003. Prinsip utama kebijakan Merdeka Belajar adalah memberikan otonomi kepada

setiap satuan pendidikan untuk melakukan inovasi, yang pada dasarnya bertujuan untuk mendorong guru dan peserta didik dalam mengembangkan kualitas secara mandiri. Guru dan siswa diberi kemerdekaan dalam mengakses pengetahuan serta metode pembelajaran yang inovatif. Inti dari Merdeka Belajar adalah mengembalikan tanggung jawab pengelolaan pendidikan kepada sekolah dan pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Walaupun demikian, semua ini masih harus tunduk pada prinsip-prinsip kebijakan Merdeka Belajar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat guna mencapai tujuan pendidikan. Kebijakan Merdeka Belajar yang dimulai sejak tahun 2020 diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi disparitas kualitas pendidikan di Indonesia.

Hasil survei PISA (2018) mencerminkan bahwa Indonesia menduduki peringkat terbawah di antara 79 negara yang berpartisipasi. Dalam konteks global, kebijakan Merdeka Belajar juga sejalan dengan agenda Pendidikan dalam Presidensi G20 “Recover Together, Recover Stronger”. Empat agenda prioritas tersebut dirangkum dalam konsep Merdeka Belajar. Salah satu program unggulan yang diinisiasi oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim adalah program sekolah penggerak. Program ini dimulai pada 1 Februari 2021 dan diterapkan pada tahun ajaran 2021/2022 di 2500 sekolah di 34 provinsi di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan pendidikan berkualitas di Indonesia dengan penekanan pada pengembangan pengetahuan dan karakter siswa. Program sekolah penggerak fokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara komprehensif untuk mencapai Profil Pelajar Pancasila, yang melibatkan aspek literasi, numerasi, dan karakter.

Berdasarkan fokus tersebut, terdapat enam elemen Profil Pelajar Pancasila yang diharapkan seperti yang terlihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.4 Profil Pelajar Pancasila.**



Sumber:

Direktorat

Sekolah Dasar

Keseluruhan

yang terdapat

Profil Pelajar

membentuk satu

yang utuh dan

saling terkait, dan

elemen dalam Pancasila kesatuan harmonis,

harus diinternalisasi oleh para pelajar Indonesia. Profil Pelajar Pancasila merupakan

implementasi dari pendidikan karakter yang menjadi bagian dari Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dan telah ditetapkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal.

Profil Pelajar Pancasila merupakan upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya membentuk profil pelajar pancasila dalam rangka membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang memiliki kompetensi global dan memiliki nilai-nilai Pancasila.

#### 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia

Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: (a) akhlak beragama; (b) akhlak pribadi; (c) akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan (e) akhlak bernegara.

#### 2. Berkebinekaan global

Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan.

#### 3. Bergotong royong

Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong-royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.

#### 4. Mandiri

Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri.

## 5. Bernalar kritis

Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan.

## 6. Kreatif

Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.

Program Merdeka Belajar bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui pendekatan yang lebih fleksibel, inovatif, dan tanggap terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat (Ainyah, f., & Firdausy, 2021). Beberapa tujuan utama dari program ini adalah sebagai berikut (Kemdikbud, 2021):

- a) Meningkatkan kualitas pendidikan: Program Merdeka Belajar bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan mengedepankan prinsip pembelajaran yang lebih fleksibel, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat.
- b) Memperkuat kemandirian siswa: Tujuan program ini adalah memperkuat kemandirian siswa dalam belajar, sehingga mereka dapat lebih aktif dan kreatif dalam mengembangkan kemampuan diri serta mencapai prestasi yang lebih baik.
- c) Mengembangkan kompetensi guru: Program Merdeka Belajar juga bertujuan untuk mengembangkan kompetensi guru dalam menghadapi tantangan pendidikan yang semakin kompleks, agar mereka mampu memberikan pelayanan pendidikan yang lebih berkualitas dan kompetitif.
- d) Mendorong inovasi dan kreativitas: Tujuan lainnya adalah mendorong inovasi dan kreativitas di dunia pendidikan, sehingga masyarakat dapat menghasilkan ide-ide baru untuk pengembangan pendidikan yang lebih baik.
- e) Meningkatkan partisipasi masyarakat: Program ini berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembelajaran, agar mereka dapat berperan aktif dalam memberikan dukungan dan masukan untuk perkembangan pendidikan di Indonesia (Dewi,

K, 2020 ; Kristiawan, 2021 ; Nurhayati, F & Fitriyani, 2021). Dengan berbagai tujuan tersebut, diharapkan program Merdeka Belajar dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia serta mencetak generasi yang mandiri, kreatif, dan kompetitif dalam era globalisasi. Supply side dalam Merdeka Belajar merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan sistem pendidikan dalam menyediakan fasilitas, tenaga pengajar, kurikulum, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program.

Beberapa faktor yang mempengaruhi supply side Merdeka Belajar antara lain (Kemdikbud, 2021):

- 1) Fasilitas pendidikan: Ketersediaan dan kualitas fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan perangkat teknologi menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan program Merdeka Belajar.
- 2) Sumber daya manusia: Ketersediaan tenaga pengajar yang berkualitas dan berkompeten dalam mengembangkan kurikulum, metode pembelajaran, dan penilaian menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas program Merdeka Belajar.
- 3) Kurikulum: Kurikulum yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat kualitas pendidikan.
- 4) Anggaran: Sumber daya keuangan yang cukup dan efektif dalam penggunaannya menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi program Merdeka Belajar.

Sementara itu, demand side Merdeka Belajar berkaitan dengan ekspektasi dan kebutuhan siswa dan masyarakat dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas (Widodo, 2020). Beberapa faktor yang mempengaruhi demand side Merdeka Belajar antara lain:

- 1) Kebutuhan masyarakat: Masyarakat membutuhkan pendidikan yang dapat mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi tantangan masa depan (Nugraha, 2020).
- 2) Kemampuan siswa: Siswa membutuhkan pendidikan yang dapat membantu mereka mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kompetensi yang diperlukan untuk bersaing di era globalisasi (Utomo, 2020).
- 3) Harapan orang tua: Orang tua membutuhkan pendidikan yang dapat membantu anak-anak mereka mencapai prestasi yang lebih baik dan membuka peluang untuk kesuksesan di masa depan (Setiawan & Yusuf, 2021).

Dalam implementasi program Merdeka Belajar, perlu diperhatikan keseimbangan antara supply side dan demand side, sehingga program tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi siswa dan masyarakat secara keseluruhan.

## E. Pembelajaran Holistik

Pembelajaran holistik adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pengembangan individu secara keseluruhan, termasuk aspek kognitif, emosional, sosial, dan fisik. Konsep ini memandang siswa sebagai makhluk multidimensional yang memiliki kebutuhan, potensi, dan tantangan yang beragam. Pembelajaran holistik bertujuan untuk mempromosikan perkembangan yang seimbang dalam semua aspek kehidupan siswa, bukan hanya fokus pada pengetahuan akademis. Beberapa teori dan konsep yang relevan dengan pembelajaran holistik termasuk:

### 1. Teori Konstruktivisme

Teori ini menekankan bahwa pembelajaran adalah hasil dari konstruksi pengetahuan oleh siswa. Pembelajaran holistik memungkinkan siswa untuk menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman dan pengetahuan yang sudah ada dalam konteks mereka sendiri (Vygotsky, L. S, 1978).

### 2. Teori *Multiple Intelligences* (Kecerdasan Majemuk)

Howard Gardner mengemukakan teori ini, yang menyatakan bahwa siswa memiliki berbagai jenis kecerdasan, termasuk verbal-linguistik, logika-matematis, visual-spatial, interpersonal, intrapersonal, musikal, kinestetik, dan lainnya. Pembelajaran holistik memperhitungkan beragam kecerdasan ini dalam proses pembelajaran (Gardner, 1999)

### 3. Teori Belajar Sosial (*Social Learning Theory*)

Albert Bandura mengemukakan teori ini yang menekankan bahwa pembelajaran dapat terjadi melalui pengamatan dan interaksi sosial. Pembelajaran holistik mempromosikan kolaborasi dan interaksi sosial di dalam kelas (Bandura, 1977).

### 4. Pendekatan Humanistik (*Humanistic Approach*)

Teori ini menekankan aspek kemanusiaan siswa, seperti keinginan untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Pembelajaran holistik memperhatikan kebutuhan emosional dan psikologis siswa (Dewey, 1916).

### 5. Teori Ekologi (*Ecological Theory*)

Konsep ini melihat siswa sebagai produk dari lingkungan mereka, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pembelajaran holistik mempertimbangkan pengaruh lingkungan terhadap perkembangan siswa (Bronfenbrenner, 1979).

Beberapa prinsip utama pembelajaran holistik meliputi:

#### 1. Integrasi Kurikulum

Kurikulum dirancang untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan pengalaman belajar siswa. Ini membantu siswa melihat hubungan antara berbagai konsep dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari.

## 2. Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran harus relevan dengan kehidupan nyata siswa. Ini dapat dicapai dengan membawa materi pembelajaran ke dalam konteks yang relevan dengan pengalaman dan kebutuhan siswa.

## 3. Pengembangan Kecerdasan Majemuk

Pembelajaran holistik mengakui bahwa siswa memiliki beragam jenis kecerdasan, termasuk kecerdasan verbal-linguistik, logika-matematis, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, musikal, visual-spatial, dan lainnya. Guru harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan berbagai jenis kecerdasan ini.

## 4. Pembelajaran Berpusat pada Siswa

Pembelajaran holistik mengutamakan peran siswa dalam proses pembelajaran. Guru berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran yang membantu siswa mengeksplorasi, berpikir kritis, dan memahami materi secara mendalam.

## 5. Pengembangan Keterampilan Hidup

Selain pengetahuan akademis, pembelajaran holistik juga menekankan pengembangan keterampilan hidup yang penting, seperti kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, bekerja sama, dan mengatasi masalah.

## F. Konsep Program Sekolah Penggerak (PSP)

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 162 Tahun 2021 Tentang Program Sekolah Penggerak Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 162 Tahun 2021. Kemendikbudristek mengeluarkan keputusan Menteri tentang program sekolah penggerak. Program Sekolah Penggerak sebagai model satuan pendidikan bermutu adalah program Kemendikbud dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Surat Keputusan Menteri No. 162 tahun 2021 menjadi dasar hukum pelaksanaan program sekolah penggerak. PSP atau Program Sekolah Penggerak sebagai program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong

perwujudan profil pelajar Pancasila. Keputusan Mendikbud No. 162 Tahun 2021 mencabut Kepmendikbud No. 1177 Tahun 2020 tentang Program Sekolah Penggerak. Namun Ketentuan yang mengacu kepada No. 1177/M/2020, Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan sebagai sekolah penggerak, dan kerja sama yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini. Kepmendikbud ini memiliki dua lampiran yaitu mekanisme penyelenggaraan program sekolah penggerak dan pedoman pembelajaran pada program sekolah penggerak.

Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program Sekolah Penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju. Program dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Program Sekolah Penggerak (Kemendikbud, 2021).

Program sekolah penggerak telah berjalan pada periode 2021-2022 sebagai bagian implementasi kebijakan Merdeka Belajar Episode ke-7 yang merupakan katalis untuk mewujudkan visi reformasi pendidikan Indonesia yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik. Namun, hal ini masih menjadi perbincangan di tengah kurikulum yang sering berubah di setiap periode pemerintahan, sehingga diperlukannya evaluasi yang mampu menjawab keberhasilan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah Dasar merupakan jenjang awal dalam Pendidikan Formal. Sudah semestinya menjadi cikal bakal pembentukan karakter manusia serta menjadi langkah awal dalam memperbaiki mutu pendidikan, sehingga sekolah dasar menjadi subjek dan objek pelaksana program.

Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam program Sekolah Penggerak yaitu untuk menjalin komunikasi yang baik dengan guru, membantu mengembangkan kemampuan anak, terlibat dalam kegiatan sekolah, mendorong partisipasi siswa, dan menjaga kondisi kesehatan dan kesejahteraan anak. Dalam program Sekolah Penggerak, kedua aspek ini perlu diperhatikan secara bersama-sama, karena peningkatan kualitas guru dan sekolah akan membantu memenuhi kebutuhan siswa, sementara memenuhi kebutuhan siswa akan membantu meningkatkan kualitas guru dan sekolah secara keseluruhan.

Mekanisme Penyelenggaraan Sekolah Penggerak Mekanisme Penyelenggaraan Sekolah penggerak diatur sebagai berikut: 1) Sosialisasi Program Sekolah Penggerak; 2) Penetapan provinsi/kabupaten/kota sebagai penyelenggara Program Sekolah Penggerak; 3) Penetapan satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak; 4) Pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota; 5) Pelaksanaan

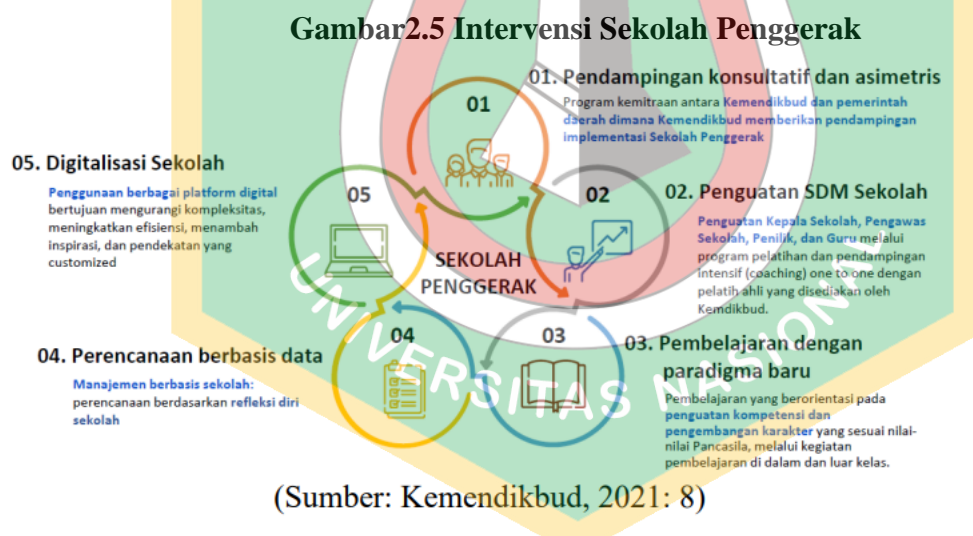


kegiatan Program Sekolah Penggerak pada satuan pendidikan; dan 6) Evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.

Pedoman pembelajaran pada program sekolah penggerak. Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 162 tahun 2021 menetapkan bahwa Pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak menggunakan pedoman pembelajaran yang khusus, meliputi: 1) Kerangka dasar kurikulum; 2) Struktur kurikulum; 3) Linieritas guru; 4) Capaian pembelajaran; 5) Prinsip pembelajaran dan asesmen; 6) Perangkat ajar; 7) Kurikulum operasional di satuan pendidikan; dan 8) Evaluasi pembelajaran pada sekolah penggerak.

### 1. Intervensi Program Sekolah Penggerak

Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistic dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta nonkognitif (karakter) yang diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru). Kepala sekolah dan guru dari sekolah penggerak melakukan pengimbasan kepada satuan pendidikan lain (Kemendikbud, 2021: 6). Program sekolah penggerak terdiri dari lima intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Adapun lima intervensi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



*Pertama,*  
Pendampingan konsultatif dan asimetris yaitu program kemitraan antara kemendikbud

dan pemerintah daerah dimana kemendikbud memberikan pendampingan implementasi sekolah penggerak. Kemendikbud melalui UPT di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan bagi pemda provinsi dan kab/kota dalam perencanaan Program Sekolah Penggerak. Kemudian UPT Kemendikbud di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan Pemda selama implementasi Sekolah Penggerak seperti fasilitasi Pemda dalam sosialisasi terhadap pihak-pihak yang dibutuhkan hingga mencari solusi terhadap kendala lapangan pada waktu implementasi.

*Kedua*, Penguatan SDM Sekolah yaitu penguatan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif (*coaching*) *one to one* dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemendikbud. 1) Pelatihan untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik dan guru yaitu terdapat pelatihan implementasi pembelajaran dengan paradigm baru bagi kepala sekolah, pengawas, penilik dan guru serta pelatihan kepemimpinan pembelajaran bagi kepala sekolah, pengawas, penilik. 2) Pendampingan untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, dan guru berupa in-house training, lokakarya tingkat Kabupaten/Kota, komunitas belajar/praktisi (kelompok mapel), program pendampingan/ coaching dengan sisten 1-on-1 dengan kepala sekolah dan bermintra dengan kepala sekolah, guru dilatih nasional untuk pendampingan berkelompok dengan guru. 3) implementasi teknologi yaitu terdapat literasi teknologi, platform guru (profil dan pengembangan kompetensi), platform guru (pembelajaran); platform sumber daya sekolah, platform rapor pendidikan.

*Ketiga*, Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Adapun merujuk pembelajaran pada pelajar pancasila yang dipelajari melalui 1) program intrakulikuler dengan indikator pembelajaran berdiferensiasi, capaian pembelajaran disederhanakan, siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi, guru leluasa memilih perangkat ajar sesuai kebutuhan. 2) program kokurikuler lintas mata pelajaran dengan indikator berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum, pembelajaran interdisipliner di luar kegiatan kelas, melibatkan masyarakat, muatan lokal dikembangkan sesuai dengan isu nasional dan global.

*Keempat*, Perencanaan berbasis data yaitu manajemen berbasis sekolah yang berdasarkan refleksi diri satuan pendidikan. *Kelima*, Digitalisasi sekolah yaitu penggunaan berbagai platform digital bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah aspirasi, dan pendekatan yang *customized*. Beberapa penggunaan platform yaitu 1) platform guru sebagai profil dan pengembangan kompetensi yaitu digunakan alat bantu untuk meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran berbasis *microlearning* dan habituasi; 2) platform guru untuk pembelajaran sebagai alat bantu guru untuk menjalankan pembelajaran kompetensi holistic dan pembelajaran berdiferensiasi; 3) platform sumber daya sekolah untuk meningkatkan fleksibilitas, transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen sumber daya sekolah; 4) dashboard rapor pendidikan untuk memotret mutu pendidikan secara akurat dan otomatis ditujukan untuk evaluasi dan perencanaan.

## 2. Tujuan Program Sekolah Penggerak (PSP)

Pada dasarnya, PSP bertujuan mendorong proses transformasi satuan pendidikan, sebagaimana yang dijelaskan pada subbab sebelumnya bahwa visi program ini diharapkan dapat meningkatkan capaian hasil belajar siswa secara *holistic* yang tidak hanya berfokus pada kompetensi kognitif tetapi juga karakter dalam upaya mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. Sehingga perubahan yang diharapkan tidak tertuju pada satuan pendidikan saja, melainkan untuk merangsang terbentuknya ekosistem pendukung perubahan dan gotong royong di tingkat daerah dan nasional sehingga transformasi dapat terjadi secara luas dan terlembaga. Hal ini juga senada dengan usaha untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter serta profesional agar mampu mendukung pembangunan berkelanjutan pada masa mendatang (Kemendikbud, 2020).

Kemudian secara spesifik, tujuan PSP menitikberatkan pada beberapa aspek yaitu pembelajaran, manajemen, optimalisasi teknologi, evaluasi dan perencanaan berdasarkan bukti serta kolaborasi antara banyak pihak. *Pertama*, aspek pembelajaran yang fokusnya tidak hanya pada pengembangan kompetensi pada peserta didik (siswa), tetapi juga pada manajemen sekolah yaitu terkait dengan pengembangan kapasitas pengajar (kepala sekolah dan guru) untuk mendorong penguatan terciptanya pembelajaran berkualitas. *Kedua*, inovasi berbasis digital. PSP memudahkan guru untuk berinovasi terkait pembelajaran, memudahkan kepala sekolah untuk melakukan pengelolaan sekolah dan evaluasi diri melalui pendekatan digitalisasi sekolah. *Ketiga*, evaluasi. Hadirnya PSP juga diharapkan bisa meningkatkan kapasitas pemda agar mampu melakukan evaluasi yang didasarkan pada bukti demi menghasilkan kebijakan di sektor pendidikan yang berorientasi pada pemerataan pendidikan berkualitas. *Kelima*, kolaborasi atau kemitraan. PSP mendorong terciptanya iklim kolaborasi di antara para pemangku kepentingan di bidang pendidikan yang meliputi sekolah, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat. Sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila
- b. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- c. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas; dan

d. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah, maupun pemerintah.

### 3. Karakteristik Program Sekolah Penggerak (PSP)

Secara garis besar terdapat beberapa karakteristik dari program PSP menekankan pada adanya kolaborasi, keterjangkauan, integrasi, intervensi dan pendampingan. *Pertama*, kolaborasi antara kemendikbud dengan pemerintah daerah (pemda) dan komitmen pemda menjadi kunci utama. *Kedua*, PSP menjangkau seluruh sekolah, tidak terbatas pada sekolah unggulan baik sekolah negeri maupun swasta. *Ketiga*, program dilakukan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak. *Keempat*, intervensi dilakukan secara holistik, mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan pemda. *Kelima*, pendampingan dilakukan selama tiga tahun ajaran dan sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri.

### 4. Manfaat Program Sekolah Penggerak

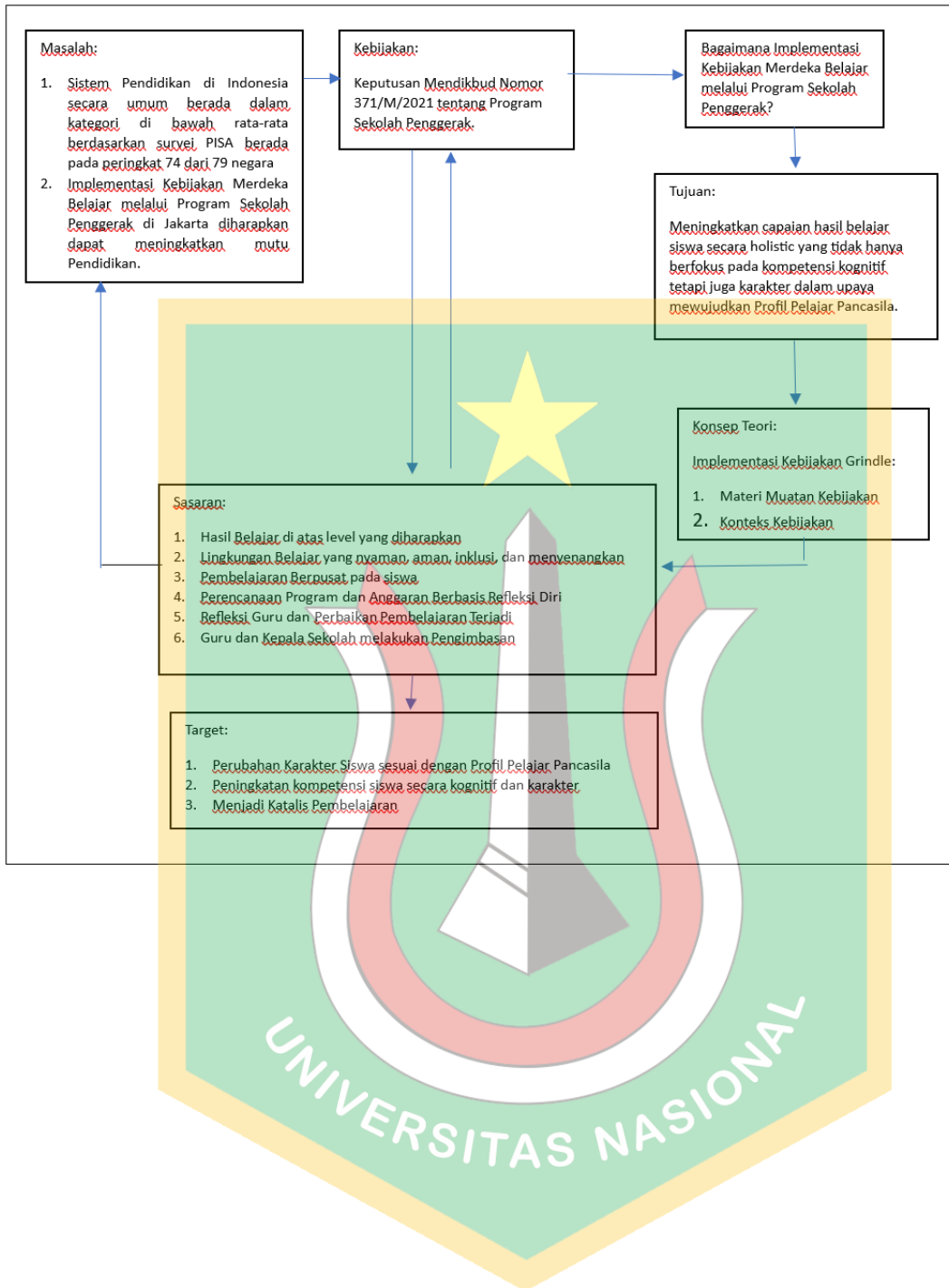
Ada beberapa manfaat yang dihasilkan dari program ini, baik untuk pemerintah daerah maupun satuan pendidikan.

1. Bagi pemerintah daerah: meningkatkan mutu pendidikan dan kompetensi SDM pendidikan di daerah, memberikan efek multiplier dari sekolah penggerak akan mempercepat peningkatan mutu pendidikan di daerah, menjadi daerah rujukan praktik baik dalam pengembangan sekolah penggerak.
2. Bagi satuan pendidikan: meningkatkan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan, mendapatkan akses untuk keahlian atau kompetensi kepala sekolah dan guru, akses teknologi atau digitalisasi sekolah, memperoleh pendampingan yang intensif bagi transformasi satuan pendidikan, menjadi katalis perubahan bagi satuan pendidikan lainnya, mendapatkan tambahan anggaran bagi peningkatan kualitas pembelajaran.

### G. Kerangka Pemikiran

Kebijakan Merdeka Belajar merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Program ini dibagi menjadi beberapa komponen, salah satunya adalah Sekolah Penggerak. Sekolah Penggerak merupakan sekolah yang diharapkan dapat menjadi model atau contoh bagi sekolah-sekolah lainnya dalam menerapkan pendidikan yang inovatif dan berkualitas. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.6 Skema Penelitian



Sumber : diolah oleh penulis, 2023